

ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN OLEH SATUAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

Habib Muhammad Romdhoni Mubarak¹, Ivan Darmawan², Selvi Centia³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email Korespondensi : habib21004@mail.unpad.ac.id

Submitted: 15-01-2025; Accepted: 23-01-2024; Published : 25-01-2025

ABSTRAK

Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 mengalami kasus kebakaran sebanyak 360 kejadian yang menjadikannya salah satu bencana tertinggi di tahun tersebut. Tingginya kasus kebakaran tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia, jumlah armada, alokasi anggaran, serta ditemukannya faktor penghambat eksternal yang kian mempersulit proses penanggulangan kebakaran. Penelitian ini berupaya menganalisis pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan pemadam kebakaran di Kabupaten Majalengka berdasarkan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data dari proses observasi dan wawancara, serta analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman. Hasilnya, pemberdayaan masyarakat menggunakan perencanaan dan kebijakan serta pemberdayaan masyarakat menggunakan aksi-aksi sosial dan politik tidak berjalan optimal diakibatkan sedikitnya akses masyarakat untuk terlibat dan ditemukannya hambatan dalam proses penyelenggaraannya. Sedangkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat menggunakan pendidikan dan penumbuhan kesadaran berjalan optimal dengan ditemukannya hasil dari masyarakat yang mendapat pengetahuan informasi kebakaran serta peningkatan kesadaran diri tentang pencegahannya.

Kata kunci: Bencana Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana

ABSTRACT

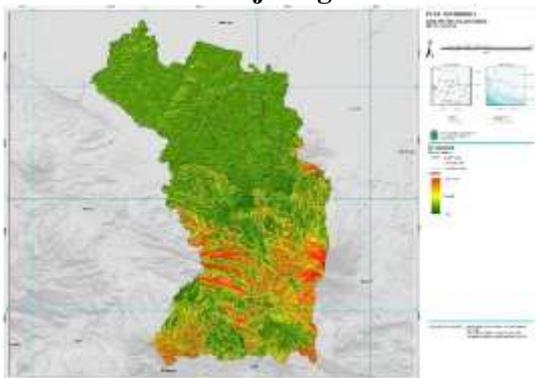
In 2023, Majalengka Regency experienced 360 fire incidents, making it one of the highest disasters in that year. The high number of fire cases is not comparable to the available resources, number of fleets, budget allocations, and the discovery of external inhibiting factors that further complicate the firefighting process. This study attempts to analyze community empowerment carried out by the fire department in Majalengka Regency based on the empowerment theory put forward by Jim Ife using a qualitative research method with a descriptive approach through data collection from the observation and interview, and data analysis using techniques from Miles and Huberman. As a result, community empowerment using planning and policies and community empowerment using social and political actions did not run optimally due to the limited access for the community to get involved and the obstacles found in the implementation process. Meanwhile, the implementation of community empowerment using education and awareness building ran optimally with the discovery of results from the community who received knowledge of fire information and increased self-awareness about its prevention.

Keywords: *Community Empowerment, Disaster Management, Fire Disaster*

PENDAHULUAN

Kabupaten Majalengka, merupakan salah satu wilayah administratif di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan pada wilayahnya. Hal ini karena pada wilayah selatan, timur, wilayah Kabupaten Majalengka berada pada gugus pegunungan Ciremai dan gugus pegunungan Cakrabuana yang berakibat pada keadaan lingkungan dengan suhu udara yang relatif lebih sejuk, kontur tanah berkelok dan naik turun, serta berada pada dataran yang lebih tinggi sehingga wilayah tersebut sangat ideal untuk menjadi area perkebunan palawija dan sebagainya. Sedangkan wilayah utara cenderung memiliki dataran yang relatif lebih datar dengan suhu udara lingkungan relatif lebih panas dan lebih cocok untuk kawasan pertanian padi. Hal tersebut juga mendorong Kabupaten Majalengka memiliki potensi besar di bidang pariwisata khususnya wisata alam.

Gambar 1 Peta Topografi Kabupaten Majalengka



Sumber : www.Petamajalengka.online

Meskipun memiliki potensi yang besar baik dibidang perkebunan dan pertanian, pada sisi lainnya saat terjadi musim kemarau berkepanjangan wilayah-wilayah tersebut justru memiliki potensi kebakaran yang sangat tinggi karena vegetasi tanaman menjadi kering, suhu udara meningkat, terlebih pada musim kemarau Kabupaten Majalengka sering mengalami angin yang bertiup kencang yang dapat memicu terjadinya kebakaran secara luas dan tidak terkendali.

Potensi kebakaran tersebut dapat dibuktikan dengan data mengenai tingginya kasus kebakaran di Kabupaten Majalengka pada tahun 2023, meliputi :

Tabel 1 Kejadian Kebakaran di Kabupaten Majalengka Tahun 2023

No.	Jenis Kebakaran	Jumlah Kejadian
1.	Kebakaran Kawasan Hutan dan Lahan	256 Kasus
2.	Kebakaran Pemukiman/Perumahan	45 Kasus
3.	Kebakaran Kawasan Industri	34 Kasus
4.	Kebakaran Peternakan	9 Kasus
5.	Kebakaran Tempat Pembuangan Sampah	9 Kasus
6.	Kebakaran Kendaraan	7 Kasus

Sumber : Arsip Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka, 2023

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 angka kejadian kebakaran di Kabupaten Majalengka mayoritas disebabkan oleh kebakaran Hutan dan Lahan dengan 256 kasus kejadian. Hal tersebut juga terjadi karena pada tahun yang sama wilayah Kabupaten Majalengka mengalami musim kemarau panjang. Kabupaten Majalengka yang wilayahnya mayoritas berupa lahan terbuka seperti kawasan pertanian, perkebunan, dan lahan terbuka lainnya akan sangat rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem seperti kemarau berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Selain kebakaran yang erat kaitannya dengan perubahan musim seperti kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi disebabkan oleh faktor lain salah satunya manusia yang menjadi penyebab tingginya angka kasus kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Majalengka. Seperti yang disampaikan oleh Qamariyanti bahwa masyarakat biasanya membakar kawasan lahan terbuka seperti padang rumput, pembukaan dan perambahan hutan, pelaku yang menyebabkan kebakaran seperti tidak sengaja membuang rokok yang masih menyala, belum maksimal penegakkan hukum, dan kepedulian dari pihak untuk menjaga lingkungan (Qamariyanti et al., 2023). Dari penjelasan tersebut, tentunya manusia menjadi salah satu faktor mengapa kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena banyak sekali kepentingan yang mengakibatkan potensi kebakaran terjadi, terlebih pada tahun tersebut terjadi kemarau berkepanjangan yang

membuat kebakaran mudah sekali menyebar. Kabupaten Majalengka pada tahun yang sama juga kerap mengalami kebakaran kawasan pemukiman dengan 45 kasus kejadian dan kebakaran kawasan industri dengan 34 kasus kejadian. Di mana menurut Widyastuti, kebakaran dalam lingkungan rumah tangga yang di dalamnya termasuk kawasan pemukiman dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja (Widyastuti et al., n.d.). Sehingga banyak sekali kasus kejadian kebakaran yang terjadi karena masyarakat tidak tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan berpotensi menyebabkan kebakaran, salah satunya bersumber dari kompor gas yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja sendiri sejatinya tidak hanya diberikan kepada para pekerja, tetapi juga mestinya diberikan kepada masyarakat luas mengenai standar keselamatan terhadap barang-barang yang memiliki potensi bahaya dalam penggunaannya.

Kasus kebakaran lainnya yang sangat tinggi adalah kebakaran kawasan industri yang terjadi pada tahun 2023. Kawasan industri mayoritas berada pada wilayah utara meliputi Kecamatan Ligung, Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Bongas, dan Kecamatan Sumberjaya. Kasus kebakaran yang terjadi dapat disebabkan faktor *human error and system*. Meskipun setiap industri memiliki pekerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang bertanggung jawab dalam melindungi pekerja dari potensi risiko bahaya pekerjaan dan sistem proteksi kebakaran bangunan dan gedung, saat api tidak dapat dikendalikan dan semakin besar maka satuan pemadam kebakaran harus bertindak untuk membantu menanggulangi kebakaran yang terjadi. Hal tersebut sangat vital untuk dilakukan mengingat kawasan industri menampung ribuan pekerja yang rentan menjadi korban, terlebih kawasan industri memiliki risiko tersendiri ketika terjadi kebakaran seperti industri tekstil dan kimia yang di mana penanggulangan kebakaran harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan aman agar tidak menimbulkan korban jiwa. Banyaknya kasus kejadian kebakaran industri pada tahun tersebut juga menjadi fokus perhatian bagi satuan pemadam kebakaran untuk memperketat pengawasan dan izin proteksi

kebakaran bangunan dan gedung sehingga dapat mengurangi potensi kebakaran, Seperti yang disampaikan oleh Sanjoto mengenai sistem pencegahan kebakaran di bangunan gedung adalah dengan tersedianya detektor panas yang bekerja ketika mencapai suhu tertentu dan alat aktif serta mengirimkan sinyal menuju panel kontrol sehingga lokasi kebakaran dapat diketahui dan selanjutnya mengaktifkan alarm, tujuannya agar potensi kebakaran dapat diantisipasi dengan lebih baik (Sanjoto et al., 2019). Karena pada sisi yang lainnya kawasan industri menjadi jantung pendapatan penting masyarakat di Kabupaten Majalengka selain dari bidang pertanian. Oleh karena itu, satuan pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi semua itu. Dengan besarnya tanggung jawab yang harus dipenuhi dan kasus kejadian kebakaran yang tidak dapat diprediksi, hal ini menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Majalengka untuk bertindak secara cepat dalam menangani dan menanggulangi kebakaran yang terjadi melalui berbagai macam tindakan seperti pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, kerja sama antar instansi, dan berbagai macam program lainnya yang mendukung upaya perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dimasa mendatang.

Pada implementasinya, penanggulangan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Majalengka mengalami banyak sekali hambatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baik yang bersumber dari sisi internal satuan pemadam kebakaran itu sendiri maupun dari sisi eksternal. Pada sisi internal, jumlah kejadian kebakaran yang sangat tinggi tidak sebanding dengan jumlah personil yang tersedia yang hanya berjumlah 18 orang secara keseluruhan, meliputi :

Tabel 2 Jumlah Personil pemadam Kebakaran

No.	Status	Jumlah Tersedia
1.	Pegawai Struktural	3 Orang
2.	Pegawai Kontrak	15 Orang

Sumber : Arsip Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka, 2024

**Analisis Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kebakaran
Oleh Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Tahun 2023
(Habib Muhammad Romdhoni Mubarak, Ivan Darmawan, Selvi Centia)**

Dari data tersebut, tentunya jumlah personil yang terbatas akan sangat menghambat proses penanggulangan kebakaran yang terjadi terlebih kebakaran memiliki waktu yang sangat rentan pada 15 menit pertama kejadian atau kerap menjadi acuan *fast response* bagi pemadam kebakaran. Selain itu, armada yang tersedia juga tidak mendukung secara jumlah, di mana pada tahun 2023 armada pemadam kebakaran di Kabupaten Majalengka hanya terdapat 6 armada secara keseluruhan di mana menurut Sari, seharusnya pos pemadam kebakaran idealnya hanya maksimal melayani tiga kelurahan (Sari & Ayuningtyas, 2020), tentunya jumlah armada yang tersedia sangat jauh dari ideal karena saat ini jumlah Kecamatan di Kabupaten Majalengka berjumlah 26 Kecamatan.

Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama Kota Bandung mengalami kasus kebakaran sebanyak 352 kejadian yang didominasi terjadi pada kawasan organisasi. Berdasarkan data dari Open Data Bandung dan Portal Jabarprov, tingginya kasus kebakaran tersebut diantisipasi dengan ketersediaan personil dan armada yang lebih memadai dengan 192 personil dan 232 armada yang disebar ke dalam 5 pos satuan untuk melindungi 30 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 2.579.837 jiwa. Tentunya, ketersediaan personil dan armada yang dimiliki Kota Bandung jauh lebih ideal jika dibandingkan dengan Kabupaten Majalengka, meskipun secara statistik jumlah kasus kebakaran yang terjadi pada tahun 2023 tidak terpaut jauh. Hal tersebut kemudian terkompilasi menjadi hambatan internal yang sangat signifikan dalam upaya penanggulangan kebakaran. Pemadam kebakaran selalu dituntut untuk melindungi seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab tugasnya meskipun dengan keadaan yang selalu tidak mendukung baik dari ketersediaan anggaran, jumlah sumber daya manusia, dan armada yang terbatas.

Hambatan tersebut tidak selalu dapat dijadikan alasan tidak optimal tugas yang mungkin terjadi pada nantinya, oleh karena itu dibutuhkan solusi tepat dan segera untuk mengatasi hal tersebut. Pada tahun yang sama pula, ketika terjadi kebakaran dengan kejadian lebih dari satu kasus dalam waktu yang bersamaan, hambatan internal tersebut menjadi kendala besar karena minimnya jumlah personil dan armada yang tersedia dibagi menjadi

beberapa kelompok untuk menangani dan menanggulangi kebakaran di tempat yang berbeda sehingga upaya yang dilakukan menjadi tidak optimal. Kebakaran yang terjadi pun sering kali tidak tertangani, bahkan dalam satu kasus pemadam kebakaran datang pada saat api sudah dipadamkan oleh masyarakat dan rumah sudah hangus sepenuhnya. Namun, disisi lain masyarakat sekitar juga pada akhirnya tidak selalu menyalahkan satuan pemadam kebakaran ketika mengetahui bahwa jumlah personil dan armada yang tersedia memang secara akumulatif jumlah tidak mencukupi untuk melindungi seluruh masyarakat dengan jumlah dan wilayah yang sangat luas. Pada akhirnya, masyarakat berharap bahwa satuan pemadam bisa melibatkan mereka, sehingga proses penanggulangan bisa dilakukan secara mandiri terutama pada wilayah yang sangat jauh dari markas satuan pemadam.

Selain hambatan dari sisi internal, hambatan terbesar selanjutnya berasal dari sisi eksternal yang kian mempersulit proses penanggulangan kebakaran oleh satuan pemadam kebakaran. Berikut adalah hambatan eksternal yang meliputi :

Tabel 3 Faktor Penghambat Eksternal

No.	Penghambat Eksternal
1.	Luasnya wilayah Kabupaten Majalengka (1.204 km ²).
2.	Besarnya jumlah penduduk (1.340.617 jiwa)
3.	Perbedaan karakteristik dataran dan kontur tanah antara wilayah utara-barat yang cenderung datar dengan timur-selatan yang berkelok pada daerah dataran tinggi
4.	Aksesibilitas wilayah menuju sumber air terdekat
5.	Keterlambatan informasi kebakaran
6.	Rendahnya peran masyarakat terlatih

Sumber : Data Hasil Olah Peneliti, 2024

Dari data di atas, peneliti berhasil melakukan observasi untuk menghimpun faktor-faktor penghambat eksternal dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Majalengka. Selama ini, penanggulangan masih berfokus dan bertumpu kepada satuan pemadam kebakaran sehingga tak jarang banyak kejadian kebakaran tidak tertangani dengan baik dan optimal akibat banyak hambatan yang dilalui

oleh satuan pemadam kebakaran. Dengan luas wilayah 1.204 km² satuan pemadam kebakaran dituntut bergerak cepat, meskipun akan terasa sangat mustahil ditempuh dari markas pusat yang terletak di Kecamatan Cigasong atau berada pada posisi pusat Kabupaten Majalengka apabila kasus kebakaran terjadi pada wilayah yang sangat jauh seperti di Kecamatan Lemahsugih yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Majalengka dengan karakteristik wilayah berkelok di dataran tinggi. Meskipun armada bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat memasuki wilayah pegunungan kecepatan armada akan berkurang demi keselamatan personil yang tentunya semakin menghambat waktu tempuh *fast response* menuju lokasi kebakaran yaitu 15 menit sejak laporan kebakaran di terima oleh satuan pemadam kebakaran. Meskipun secara akumulatif jumlah kejadian kebakaran pada wilayah selatan Kabupaten Majalengka tidak setinggi wilayah tengah dan wilayah utara bukan berarti kejadian kebakaran di wilayah selatan dan timur tidak diperhatikan, seluruh penduduk dalam wilayah administratif Kabupaten Majalengka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya kebakaran dan penanggulangan serta penyelamatan pada saat terjadinya kebakaran. Selain itu, banyak sekali wilayah di Kabupaten Majalengka tidak memiliki akses air yang besar untuk menunjang proses penanggulangan kebakaran. Seperti daerah pelosok dan pegunungan yang sumber air utama masih didapatkan dari air tanah maupun mata air yang dipompa. Tentunya, hal itu menjadi hambatan tersendiri karena ketika proses pemadaman api, armada memerlukan pasokan air yang sangat besar untuk proses pengisian ulang melalui proses pompa yang menyedot air dengan volume tinggi, di mana hal itu akan menjadi sulit untuk dilakukan apabila sumber airnya tidak terbuka dengan volume air yang besar seperti halnya sungai, waduk, danau, maupun kolam. Dalam kasus lainnya, ketika ditemukan sumber air seperti kolam tak jarang banyak warga yang melarang penggunaan air kolamnya oleh satuan pemadam kebakaran. Hal itu, kian mempersulit proses penanggulangan kebakaran yang dituntut untuk bergerak cepat dan menemukan solusi pengganti.

Selain itu, rendahnya peran masyarakat terlatih juga menjadi hambatan karena penanggulangan kebakaran mandiri yang

dilakukan oleh masyarakat sejauh ini masih bersifat swadaya dan tidak sesuai dengan standar yang justru dapat membahayakan diri mereka sendiri. Peran masyarakat yang terlatih akan sangat diperlukan sebagai bentuk antisipasi penanggulangan kebakaran pada wilayah yang jauh dari pusat kota dan membutuhkan penanganan segera yang sesuai dengan standar operasional prosedur pemadam kebakaran.

Tugas penanggulangan kebakaran merupakan sebuah tugas penting yang sejatinya tidak hanya menjadi tugas satuan pemadam kebakaran belaka, akan tetapi diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk saling merangkul bersama-sama mencegah, menangani, dan menanggulangi kebakaran. Oleh karena itu, satuan pemadam kebakaran di Kabupaten Majalengka berupaya mencari solusi alternatif dengan berupaya melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran secara kolektif melalui pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, pemberdayaan masyarakat masih sangat minim untuk diselenggarakan dengan berbagai alasan melatarbelakanginya. Keterlibatan masyarakat secara umum masih lebih mudah ditemukan pada sisi pencegahan. Harapannya, dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya kebakaran dengan terbentuknya masyarakat yang tangguh dan mampu secara kolektif mencegah dan menanggulangi kebakaran secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan sebuah tugas penting bagi pemerintah untuk memberikan daya bagi masyarakat sehingga mampu mengubah keadaannya untuk menjadi lebih baik dan berdaya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Maryani dan Ruth bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat untuk melakukan inisiatif dalam memulai kegiatan sosial dengan tujuan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Maryani & Ruth Roselin E. Nainggolan, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Sururi, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendapatkan pemahaman dan meningkatkan kontrol atas kekuatan pribadi, sosial, ekonomi, politik, untuk tindakan memperbaiki situasi hidup mereka. Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan fungsi pemberdayaan

bagi masyarakat sehingga tercipta keadaan kolektif untuk mencapai tujuan nasional.

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan penanggulangan kebakaran merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh satuan pemadam kebakaran untuk memberikan daya atau *power* bagi masyarakat sehingga dapat mencegah kebakaran maupun menanggulangi kebakaran secara mandiri apabila masih dalam kapasitasnya dan tidak membahayakan diri sendiri. Selain itu, harapan dari pemberdayaan yang diselenggarakan adalah menciptakan masyarakat yang paham bagaimana tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, baik itu tindakan pencegahan seperti tidak membakar lahan dan hutan pada saat musim kemarau, memasang instalasi listrik sesuai standar nasional Indonesia, dan lain sebagainya. Pada sisi penanganan dan penanggulangan, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk menangani kebakaran yang sifatnya masih kecil dan terkendali, tidak panik, dan mampu memadamkan api secara mandiri sesuai prosedur sehingga tidak membahayakan diri sendiri. Apabila api sudah tidak terkendali, masyarakat diharapkan tahu dan bertindak cepat menghubungi satuan pemadam kebakaran, pada saat yang sama masyarakat juga berupaya memadamkan api dengan sumber daya yang ada dengan tindakan yang terukur hasil dari proses pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, membantu mencari sumber air, dan mengevakuasi korban selamat hingga datangnya satuan pemadam kebakaran di lokasi kejadian. Ketika satuan pemadam kebakaran tiba tugas pemadaman akan dikendalikan sepenuhnya oleh satuan pemadam kebakaran, masyarakat yang telah diberikan pemberdayaan dapat membantu tugas-tugas lainnya yang menunjang proses pemadam api menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan optimal.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah solusi alternatif yang sangat bijak dan diperlukan oleh satuan pemadam kebakaran di Kabupaten Majalengka. Besarnya jumlah penduduk menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tugas melindungi masyarakat tidak dipegang sendiri oleh satuan pemadam kebakaran. Masyarakat juga akan sadar, bahwa melindungi lingkungan di sekitarnya adalah tugas bersama yang tidak hanya diemban oleh satuan pemadam

kebakaran belaka. Semua pihak harus terlibat, bertanggung jawab, dan saling merangkul menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya kebakaran.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan pemadam kebakaran di Kabupaten Majalengka dalam upaya penanggulangan kebakaran. Untuk menganalisis penyelenggaraan pemberdayaan tersebut, peneliti akan menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife untuk meninjau pemberdayaan tersebut berdasarkan tiga metode pemberdayaan yang digunakan meliputi :

- a. Pemberdayaan menggunakan perencanaan dan kebijakan, merupakan sebuah upaya di mana pemerintah hadir dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan dalam upaya penanggulangan kebakaran. Upaya pemberdayaan yang diselenggarakan dapat memberikan akses yang sama pada setiap masyarakat, tidak dibedakan berdasarkan derajat kepentingan, dan mengutamakan peran masyarakat untuk memberikan tanggapan dan reaksi atas fenomena permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Hal ini bertujuan, agar perencanaan yang disusun mampu mengatasi permasalahan secara relevan berdasarkan keadaan yang sama di lapangan. Pada sisi pemberdayaan menggunakan kebijakan, pemerintah berupaya menghasilkan kebijakan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk dapat terlibat dan mengubah keadaannya. Dua upaya dalam pemberdayaan ini lebih menekankan pada peran pemerintah sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan mengatur masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka penanggulangan kebakaran, pemberdayaan menggunakan perencanaan dan kebijakan, pemerintah berupaya memberikan akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan penanganan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran yang terjadi di sekitar masyarakat. Hasil dari perencanaan tersebut pada nantinya

- b. Pemberdayaan menggunakan aksi-aksi sosial dan politik, merupakan sebuah upaya menghasilkan aksi-aksi sosial yang membangun keadaan masyarakat untuk lebih berdaya dengan program yang akan diselenggarakan. Aksi-aksi sosial yang diselenggarakan juga mendorong masyarakat luas untuk terlibat bersama menciptakan keadaan kolektif yang mampu mengubah keadaannya. Pemerintah sebagai inisiator dituntut memiliki kecakapan luas untuk menciptakan aksi-aksi yang beragam, inovatif, dan berkelanjutan sehingga program pemberdayaan yang dihasilkan tidak hanya digunakan sekali akan tetapi kontinu. Dalam proses pemberdayaan ini, pemerintah juga tidak selalu kaku dan dapat melibatkan pihak lain seperti lintas instansi, mitra swasta, komunitas, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain yang memiliki tujuan dan kepentingan sama sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang akan di capai. Menurut Aryanisilia, peran partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena mereka adalah objek pembangunan yang akan menentukan berhasil tidaknya tujuan yang telah ditetapkan (Aryanisilia, 2023), oleh karena itu pemberdayaan dengan aksi-aksi sosial diselenggarakan dengan melibatkan pihak-pihak lain. Hasilnya, pemberdayaan menggunakan aksi-aksi sosial juga tidak hanya mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik tetapi juga mampu menciptakan kolaborasi dan keterbukaan informasi bersama. Sehingga pada sisi lainnya citra pemerintah juga akan semakin baik di mata masyarakat. Selain itu, pemberdayaan ini juga berupaya membentuk ruang politik dalam menciptakan kekuasaan yang efektif sehingga mampu mempengaruhi masyarakat di sekitarnya.
- c. Pemberdayaan menggunakan pendidikan dan penumbuhan kesadaran merupakan sebuah upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan informasi kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang cerdas terhadap suatu fenomena dalam hal ini pendidikan mengenai penanggulangan kebakaran. Pemberdayaan menggunakan pendidikan, diharapkan mampu memberikan daya yang lebih besar karena

bersifat lanjut yang artinya setelah program pemberdayaan selesai diberikan, pengetahuan yang didapatkan dapat digunakan dan diberikan kepada pihak masyarakat lainnya atau dalam bahasa lainnya berbagai pengetahuan tentang penanggulangan kebakaran. Pendidikan yang diberikan, dapat diberikan kepada setiap lapisan masyarakat tanpa ada target tertentu, karena pengetahuan yang diberikan bisa berupa pengetahuan umum. Adapun target lapisan tertentu juga bisa dilakukan oleh satuan pemadam kebakaran, seperti pekerja industri maupun pihak lain yang dirasa memerlukan pendidikan lanjutan tentang penanggulangan kebakaran. Sedangkan, penumbuhan kesadaran merupakan upaya untuk mengubah kebiasaan masyarakat terhadap suatu fenomena untuk lebih sadar diri dan membentuk kebiasaan baru sesuai dengan tujuan dalam pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, masyarakat yang semula tidak sadar sering melakukan tindakan yang berpotensi menyebabkan kebakaran memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kembali hal tersebut, justru masyarakat akan melakukan tindakan sebaliknya setelah diberikan penumbuhan kesadaran seperti melakukan tindakan pencegahan mandiri maupun kolektif. Hal ini menurut Lesmana, disebabkan masyarakat sadar kebakaran yang terjadi akan sangat mempengaruhi dan berdampak pada aktivitas sehari-hari dan juga kesehatannya, sehingga penumbuhan kesadaran akan lebih mudah diterima (Lesmana et al., 2023). Penumbuhan kesadaran dilakukan secara berkala, baik melalui media langsung maupun digital untuk mengakses setiap lapisan masyarakat sehingga tercipta kesadaran komunal untuk bersama-sama melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Selain itu, menurut Talakua, penyuluhan akan meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku (Talakua, 2022). Sehingga penumbuhan kesadaran akan sangat efektif untuk diselenggarakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan luaran berupa

penjelasan deskriptif untuk menghasilkan luaran penelitian yang lebih kompleks, sistematis, dan akurat. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menggali data lebih dalam tentang fenomena yang diangkat yaitu penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Majalengka secara natural. Menurut Fiantika, penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai penelitian yang temuannya tidak bersifat statistik, dan menekankan pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, dan tingkah subjek pada situasi tertentu (Fiantika et al., 2022). Selain itu, pendekatan kualitatif memiliki beberapa keunggulan seperti yang disampaikan oleh Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, serta penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dengan data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2014). Tentunya, keunggulan tersebut akan sejalan dengan penelitian ini di mana fenomena kebakaran dan reaksi masyarakat dalam penanggulangannya merupakan naluri alamiah yang tidak dapat ditemukan dari hasil eksperimen. Selain itu, pemaparan yang bersifat deskriptif akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat secara umum dibandingkan dengan nilai dan angka yang cenderung lebih spesifik dan membutuhkan pengetahuan lebih lanjut dalam memahaminya. Oleh karena itu, pemaparan secara deskriptif dalam pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini akan menjadi keunggulan lain karena pada dasarnya target utama pemberdayaan adalah masyarakat umum yang membutuhkan hasil penelitian dengan kemudahan dalam memahaminya.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan yaitu observasi pada lokus penelitian untuk mengamati dan meninjau secara langsung fenomena yang terjadi, sedangkan teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara secara mendalam terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperkuat hasil observasi yang telah dilakukan, Di mana menurut Rahmawati teknik yang efektif adalah dengan cara tanya jawab dan

mengamati secara langsung responden (Rahmawati et al., 2024). Adapun narasumber yang diwawancarai antara lain satuan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka, dan masyarakat. Selanjutnya, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dari Miles dan Huberman dengan melewati tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Menggunakan Perencanaan dan Kebijakan

Satuan pemadam kebakaran di Kabupaten Majalengka pada saat ini masih tergabung bersama satuan polisi pamong praja dan menjadi bidang kebakaran di instansi satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam proses administrasi dan proses kebijakan, karena satuan pemadam kebakaran terintegrasi bersama satuan polisi pamong praja begitu pula dengan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dengan perencanaan yang dilakukan secara garis besar masih dilakukan oleh satuan pemadam kebakaran dengan sedikit ruang akses masyarakat untuk terlibat. Hal ini bukan tanpa alasan, keterbatasan sumber daya yang ada seperti anggaran, sumber daya manusia, mengakibatkan perencanaan dilakukan tanpa bisa melibatkan masyarakat demi efisiensi penyelenggaraan tugas. Satuan pemadam kebakaran menyusun rencana penyelenggaraan tugas berdasarkan pengamatan, pencegahan, dan rencana kerja. Oleh karena itu, pemberdayaan dengan perencanaan belum dapat diselenggarakan secara semestinya. Namun hal tersebut, tidak menutup satuan pemadam kebakaran untuk menerima pendapat, pandangan, atau masukan dari masyarakat. Keterbukaan informasi tetap diselenggarakan untuk menghimpun informasi dari setiap pihak yang ingin terlibat dalam pencegahan kebakaran dan lain sebagainya. Satuan pemadam kebakaran tidak bertindak kaku namun tetap dinamis dengan dinamika dan potensi kebakaran yang dapat terjadi, sehingga setiap masukan dari berbagai elemen sangat diperlukan demi terciptanya penyelenggaraan tugas yang efektif dan optimal.

Pada sisi pemerintahan desa yang menjadi salah satu ujung tombak penyelenggaraan pemberdayaan perencanaan masih tidak banyak ditemukan mengenai bidang kebakaran. Pemerintah desa masih secara umum memberdayakan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana secara umum, dan tidak secara khusus memfokuskan pada bidang kebakaran. Meskipun demikian, pada desa yang berada jauh dari pusat kota dan markas satuan pemadam kebakaran, pemerintah desa sudah menyadari dan mengantisipasi kebakaran dengan melakukan berbagai macam upaya pencegahan di samping dengan mitigasi bencana.

Selanjutnya, pemberdayaan menggunakan kebijakan dilakukan dengan membentuk kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sejauh ini, pemerintah daerah Kabupaten Majalengka bersama dengan instansi satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran telah membentuk peraturan daerah sebagai upaya kebijakan yang membahas mengenai permasalahan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, menjadi payung hukum dasar bagaimana pemerintah bereaksi dengan cepat terhadap fenomena kebakaran yang terjadi dengan intensitas tinggi pada tahun tersebut. Satuan pemadam kebakaran yang menjadi pelaksana utama dengan kebijakan tersebut berupaya menjalankannya dengan maksimal dan sebaik-baiknya.

Meskipun demikian, jika meninjau kebijakan tersebut berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat menggunakan kebijakan, perumusan kebijakan tersebut tidak dapat langsung dikatakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat menggunakan kebijakan. Hal ini, karena masyarakat yang terlibat lebih difokuskan sebagai syarat birokrasi dan pemenuhan aturan mengenai perumusan kebijakan. Masyarakat yang terlibat hanya bersifat perwakilan dan unsur-unsur tertentu yang lebih kompeten dibidangnya. Oleh karena itu, perumusan kebijakan tersebut lebih bisa diartikan sebagai upaya pembentukan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan dan tidak difokuskan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat pemberdayaan masyarakat menggunakan kebijakan jauh lebih kompleks

untuk diselenggarakan, tidak hanya bersifat keterwakilan pihak tertentu saja, akan tetapi upaya yang dilakukan juga bersifat luas dan masyarakat dapat mengaksesnya. Salah satu bagaimana penerapan pemberdayaan masyarakat menggunakan kebijakan dapat berupa Peraturan Bupati, Peraturan Desa, dan lain-lain. Di mana masyarakat akan terlibat dengan lebih luas dalam kebijakan tersebut, dan tujuan dari kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Sejauh ini, kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan masih terpusat pada peraturan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya. Satuan pemadam kebakaran juga menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada turunan aturan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dalam bidang kebakaran, sehingga gerak satuan pemadam kebakaran masih terbatas. Meskipun demikian, satuan pemadam kebakaran selalu berupaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Dari dua penjelasan di atas, mengenai pemberdayaan menggunakan perencanaan dan kebijakan dapat diketahui bahwa dua metode tersebut masih belum diselenggarakan dengan optimal oleh satuan pemadam kebakaran. Hal tersebut, dilatarbelakangi oleh berbagai hambatan yang ditemui seperti anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk menyelenggarakan pemberdayaan menggunakan dua metode ini, satuan pemadam kebakaran dituntut bekerja lebih ekstra dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Majalengka, mengingat satuan pemadam kebakaran masih bersifat bidang satuan di dalam instansi satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, sehingga alokasi anggaran maupun ruang kebijakan tidak bisa seluas instansi mandiri. Pemerintah Kabupaten Majalengka, dapat merumuskan kebijakan turunan untuk memudahkan tugas satuan pemadam kebakaran dan juga membuka ruang akses masyarakat untuk lebih jauh terlibat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan. Oleh karena itu, pembentukan instansi mandiri bagi satuan pemadam kebakaran merupakan sebuah langkah awal yang efektif untuk membuka proses pemberdayaan masyarakat dengan metode ini, karena satuan pemadam kebakaran akan mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dan dapat menambah jumlah personil serta armada yang tersedia. Ketika instansi mandiri

sudah terbentuk dan turunan peraturan sudah dirumuskan, satuan pemadam kebakaran dapat menyelenggarakan metode pemberdayaan ini secara optimal dengan melibatkan instansi di bawahnya seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagai upaya pemberdayaan menggunakan perencanaan dan kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran bersama dengan masyarakat.

B. Pemberdayaan Menggunakan Aksi-aksi Sosial dan Politik

Pemberdayaan menggunakan aksi-aksi sosial dan politik merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang sering dijumpai oleh masyarakat dan kerap dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk program pemberdayaan. Hal ini karena, aksi-aksi sosial yang dilakukan dapat dengan mudah diikuti oleh setiap masyarakat tanpa syarat tertentu dan kemampuan khusus untuk terlibat. Aksi-aksi sosial yang diselenggarakan juga biasanya dilakukan secara luas, serentak, dan melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraannya. Karena upaya pemberdayaan menggunakan aksi-aksi sosial tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja dalam hal ini satuan pemadam kebakaran, akan tetapi dapat melibatkan pihak ketiga seperti mitra swasta, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, maupun pihak lainnya yang secara garis besar memiliki visi dan tujuan yang sama sesuai dengan program pemberdayaan yang akan diselenggarakan. Tentunya, hal ini menjadi keunggulan sendiri, karena program pemberdayaan yang diselenggarakan akan menjangkau masyarakat lebih luas, jauh, dan dapat menyisir lapisan elemen terdasar seperti tingkat keluarga.

Implementasi pemberdayaan menggunakan aksi-aksi sosial selama ini diselenggarakan oleh satuan pemadam kebakaran melalui beberapa program seperti gerakan sosial dan terjun menjangkau lapisan masyarakat seperti dalam kegiatan sekolah. Meskipun secara metode, aksi-aksi sosial yang diselenggarakan sangat minim dilakukan dan lebih mendekati pemberdayaan menggunakan pendidikan dan penumbuhan kesadaran. Selain itu, program pemberdayaan ini tidak dapat diselenggarakan dengan optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, biasanya satuan

pemadam kebakaran akan melakukan kolaborasi bersama pihak lain seperti terintegrasi dengan program satuan polisi pamong praja, badan penanggulangan bencana daerah, koramil, dan pihak lainnya. Hal ini dilakukan karena pemberdayaan menggunakan aksi-aksi sosial memerlukan anggaran yang tidak sedikit serta memerlukan sumber daya yang mencukupi dalam pelaksanaan programnya. Oleh karena itu, pemberdayaan ini lebih banyak bekerja sama dengan berbagai pihak. Pada akhirnya, pemberdayaan dengan aksi-aksi sosial memerlukan perhatian lebih untuk menjalankannya, karena dibutuhkan peran pemerintah daerah Kabupaten Majalengka sebagai penyedia anggaran guna terselenggaranya pemberdayaan menggunakan aksi-aksi sosial secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Majalengka.

Selanjutnya, pemberdayaan menggunakan politik untuk menciptakan kekuasaan yang efektif. Pemberdayaan ini, mungkin sangat jarang dikenal terutama oleh masyarakat awam. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat pemberdayaan menggunakan politik tidak dapat diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Seperti halnya tujuan utama politik yaitu memengaruhi pihak lain untuk mengikuti kehendak tertentu, maka pemberdayaan ini akan efektif diberikan kepada masyarakat yang memiliki kharisma kepemimpinan, ketokohan, dan mampu menggerakkan orang lain. Dalam implementasinya, tidak banyak proses pemberdayaan menggunakan metode politik ini. Hanya pihak-pihak tertentu seperti kepala desa atau tokoh masyarakat yang diberikan informasi untuk bagaimana mengarahkan warganya ketika terjadi kebakaran. Masyarakat di Kabupaten Majalengka masih banyak yang mengikuti arahan dari tokoh masyarakat setempat, baik karena jabatannya, pendidikannya, maupun karena alasan lain yang membuat tokoh tersebut menjadi panutan dan informasi yang disampaikan akan mudah diikuti oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran melalui metode ini dalam implementasinya akan dipengaruhi oleh kualitas pihak yang mendapat pemberdayaan, baik dari segi komunikasi dengan masyarakat, atau kecakapan menyampaikan informasi. Hasil observasi peneliti menemukan bahwa biasanya

tokoh masyarakat atau pihak desa yang memiliki pengaruh kuat dimasyarakat akan dengan mudah menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat dan diikuti dengan seksama.

Oleh karena itu, pemberdayaan menggunakan metode politik tidak dijalankan dengan lebih luas seperti membentuk program khusus, karena memang hanya diperuntukkan untuk pihak tertentu dalam upaya penanggulangan kebakaran.

C. Pemberdayaan Menggunakan Pendidikan dan Penumbuhan Kesadaran

Pemberdayaan menggunakan pendidikan dan penumbuhan kesadaran merupakan salah satu metode pemberdayaan yang sering sekali digunakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Hal ini karena, pemberdayaan menggunakan pendidikan dan penumbuhan kesadaran mudah sekali untuk diselenggarakan dengan anggaran yang kecil, tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia, mudah dilakukan inovasi program, serta dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Sederhananya program pemberdayaan ini adalah upaya memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai suatu fenomena tertentu yang telah direncanakan sebelumnya dalam hal ini tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sehingga masyarakat mengetahui informasi yang dapat berguna ketika terjadinya kebakaran. Masyarakat yang diberikan pendidikan dan penumbuhan kesadaran akan memahami bagaimana tindakan yang harus dilakukan baik sejak pencegahan, penanganan, dan penanggulangan kebakaran. Sehingga tujuan akhir dari pemberdayaan ini adalah menciptakan masyarakat yang cakap dan cerdas terhadap fenomena kebakaran yang sulit diprediksi kapan dan berapa kasus kejadian terjadi. Ketika masyarakat sudah cakap dan cerdas diharapkan juga angka kasus kejadian kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia menjadi rendah atau bahkan mendekati nihil setiap tahunnya, karena masyarakat memahami tindakan preventif sebagai upaya pencegahan kebakaran, contoh sederhananya adalah masyarakat menjadi paham bahwa menggunakan instalasi listrik berstandar nasional Indonesia akan mengurangi risiko korsleting listrik yang kerap memicu kebakaran, atau dalam kasus lain masyarakat

sadar bahwa membuka lahan dengan cara dibakar akan menyebabkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Hal-hal tersebut merupakan buah dari pemberdayaan menggunakan pendidikan dan penumbuhan kesadaran.

Dalam implementasinya, satuan pemadam kebakaran menyelenggarakan pemberdayaan melalui metode ini dengan optimal jika dibandingkan dengan dua metode sebelumnya melalui perencanaan dan kebijakan serta aksi-aksi sosial dan politik. Hal ini karena pemberdayaan ini mudah diselenggarakan tanpa memerlukan banyak persiapan baik itu anggaran maupun sumber daya manusia.

Pada sisi pemberdayaan pendidikan, satuan pemadam kebakaran melakukan program pemberdayaan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat untuk mengetahui bagaimana penanggulangan api secara mandiri apabila intensitas nyalanya masih terkendali dan kecil, atau pendidikan khusus terhadap pekerja buruh pabrik yang bertugas sebagai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya masing-masing, di mana pelatihan ini dilangsungkan secara khusus selama beberapa hari untuk memberikan pelatihan dasar (latsar) kepada pekerja buruh tersebut. Pelatihan yang diberikan meliputi informasi umum kebakaran, penyebab, jenis api, proses pemadaman yang sesuai standar, penyelamatan, dan evakuasi. Hal ini sukses diselenggarakan oleh satuan pemadam kebakaran, dengan harapan kawasan industri menjadi lebih aman dari bahaya kebakaran. Pada sisi lainnya, satuan pemadam kebakaran juga memperketat izin proteksi kebakaran bangunan gedung yang menjadi tempat para pekerja buruh bekerja. Sehingga tercipta perlindungan dari berbagai sisi, baik dari sumber manusianya yang sudah diberikan pelatihan dan bangunan gedungnya yang sesuai standar keselamatan dari risiko kebakaran. Program pemberdayaan lainnya adalah pendidikan pengetahuan kebakaran kepada siswa-siswi sekolah maupun masyarakat, dengan informasi umum yang mudah dipahami dan dibalut sosialisasi yang menarik serta dapat diakses oleh setiap masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan menggunakan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pemadam kebakaran sudah berjalan dengan optimal dan diperlukan perhatian untuk mempertahankan pemberdayaan tersebut agar tetap berjalan.

**Analisis Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kebakaran
Oleh Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Tahun 2023
(Habib Muhammad Romdhoni Mubarak, Ivan Darmawan, Selvi Centia)**

Selanjutnya, pada sisi pemberdayaan menggunakan penumbuhan kesadaran, satuan pemadam kebakaran menyelenggarakan berbagai macam upaya untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat dengan fokus menciptakan kesadaran untuk mencegah kebakaran terjadi dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat. Berikut hasil observasi peneliti mengenai penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat menggunakan penumbuhan kesadaran, meliputi :

1. Sosialisasi, satuan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka menyelenggarakan pemberdayaan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan penanggulangannya. Sasaran dari pemberdayaan antara lain masyarakat desa, siswa-siswi sekolah, pekerja buruh, hingga sesama instansi pemerintah. Sosialisasi sangat berperan penting dalam pemberdayaan ini, karena satuan pemadam kebakaran akan langsung terjun menemui masyarakat. Sejauh ini, sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan dan dapat berkolaborasi bersama pihak lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk sosialisasi kepada siswa-siswi sekolah.
2. Himbuan, program pemberdayaan ini menekankan penumbuhan kesadaran terhadap masyarakat seperti tentang larangan membakar lahan. Penyelenggaraannya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa maupun tokoh masyarakat. Himbuan yang diberikan juga melakukan berbagai upaya inovatif dengan menggunakan perangkat lunak seperti media sosial instagram yang semakin memperluas jangkauan dari informasi yang diberikan.

Dari penjelasan di atas, pemberdayaan menggunakan pendidikan dan penumbuhan kesadaran bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas untuk bersama mencegah kebakaran. Hal ini didukung oleh hasil observasi peneliti terhadap masyarakat mengenai bagaimana proses pemberdayaan tersebut berjalan. Banyak masyarakat yang merasakan bagaimana satuan pemadam kebakaran berupaya meningkatkan kesadaran mereka tentang pencegahan kebakaran yang sebelumnya tidak disadari dan bahkan sering dilakukan karena tidak mengetahui risiko yang dapat terjadi. Masyarakat mendapat penumbuhan kesadaran

baik dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun pihak lainnya diberikan ketika kumpul warga, majelis, dan kegiatan lainnya yang mudah untuk di akses. Selain itu, lapisan masyarakat yang sering menggunakan media sosial juga mendapatkan informasi penting tentang kesadaran mencegah kebakaran serta informasi lainnya seputar kebakaran yang sering diunggah oleh satuan pemadam kebakaran melalui media sosial resminya.

Oleh karena itu, pemberdayaan menggunakan pendidikan dan penumbuhan kesadaran berjalan dengan optimal oleh satuan pemadam kebakaran terhadap masyarakat di Kabupaten Majalengka dengan berhasilnya proses pelatihan yang menasar target tertentu untuk menciptakan pencegahan kolektif dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebakaran yang bersumber dari sosialisasi dan himbuan dengan informasi yang lebih luas dan mudah untuk diakses setiap lapisan masyarakat.

Pemaparan di atas, sesuai dengan data hasil observasi peneliti yang menemukan bahwa masih rendahnya peran masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan kebakaran, di mana pada akses perencanaan dan kebijakan maupun aksi-aksi sosial dan politik masih tidak berjalan optimal. Sedangkan pada sisi pendidikan, masih menasar target tertentu dan tidak diberlakukan secara luas karena keterbatasan yang terjadi. Sehingga, peran masyarakat masih dalam sisi pencegahan yang merupakan hasil dari penumbuhan kesadaran melalui sosialisasi dan himbuan yang diberikan, ketika terjadinya kebakaran tindakan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat swadaya dengan dasar inisiatif dan rasa simpati untuk membantu korban

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang diselenggarakan oleh satuan pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kebakaran masih tidak berjalan dengan optimal terutama pada pemberdayaan masyarakat menggunakan perencanaan dan kebijakan serta pemberdayaan masyarakat menggunakan aksi-aksi sosial dan politik. Hal ini, dilatarbelakangi ditemukannya hambatan yang memengaruhi proses penyelenggaraan pemberdayaan yang dilakukan, seperti anggaran yang tidak mencukupi untuk menopang seluruh

mekanisme pemberdayaan, sedikitnya akses masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan yang masih bersifat pemenuhan syarat birokrasi melalui perwakilan masyarakat serta tidak difokuskan pada mekanisme pemberdayaan, pada sisi lainnya kebijakan yang menjadi dasar tugas satuan pemadam kebakaran belum memiliki aturan turunan yang dapat membuka peluang diselenggarakannya pemberdayaan masyarakat menggunakan kebijakan. Hambatan tersebut juga berpengaruh pada tidak optimalnya pemberdayaan masyarakat menggunakan aksi-aksi sosial dan politik yang membutuhkan banyak persiapan kompleks sejak perencanaan, anggaran, hingga kebutuhan sumber daya personal yang tidak sedikit. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh satuan pemadam kebakaran di Kabupaten Majalengka dengan pendekatan teori Jim Iff se jauh yang diamati oleh peneliti berjalan dengan lebih optimal dengan menggunakan metode pendidikan dan penumbuhan kesadaran. Hal ini, karena metode pemberdayaan tersebut lebih mudah untuk diselenggarakan, dapat bekerja sama dengan pihak lain, efisiensi anggaran, serta mudahnya inovasi. Hasilnya, pendidikan yang menasar target tertentu seperti buruh dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dengan adanya pekerja yang memiliki keterampilan setelah mendapatkan pendidikan dasar kebakaran. Penumbuhan kesadaran masyarakat tentang kebakaran mengalami peningkatan setelah mendapat berbagai macam informasi yang diberikan melalui sosialisasi maupun himbauan. Kesimpulan tersebut, semakin mendorong bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya kebakaran secara kolektif sehingga setiap kasus kebakaran dapat segera ditanggulangi dan tidak hanya berpangku kepada satuan pemadam kebakaran.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti menekankan pada diperlukannya perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Majalengka untuk memberikan fokus lebih terhadap satuan pemadam kebakaran, sehingga proses pemberdayaan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Alokasi anggaran, jumlah sumber daya manusia dan armada, peraturan turunan, pembentukan instansi mandiri, menjadi salah satu hal yang

perlu diperhatikan sehingga satuan pemadam kebakaran dapat bertugas dengan lebih optimal dan proses penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat juga dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Program pemberdayaan yang dapat dilakukan di antaranya pembentukan satuan relawan kebakaran pada tingkat dusun, tingkat desa, dan tingkat kecamatan, yang secara hierarki dipimpin oleh satuan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka. Setelah gugus satuan berhasil terbentuk, selanjutnya adalah penyelenggaraan pemberdayaan berbasis pendidikan dan penumbuhan kesadaran dengan memberikan pelatihan dasar seputar kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi yang diselenggarakan secara intensif kepada gugus satuan, sehingga dapat melakukan penanggulangan kebakaran secara mandiri ketika kejadian kebakaran masih bisa ditangani sesuai dengan kapasitasnya. Tujuannya, agar tercipta lingkungan yang aman bagi masyarakat dari bahaya kebakaran secara kolektif, tidak hanya mengandalkan satuan pemadam kebakaran akan tetapi masyarakat juga akan berperan dalam melindungi lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanisilia. (2023). Peran Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Banyuwangi. *Responsive : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora, dan Kebijakan Publik*, 6(2), 75. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/45336/20077>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (ed.)). Jakarta : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Lesmana, E., Saam, Z., Zulkarnaini, & Fitmawati. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan

**Analisis Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kebakaran
Oleh Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Tahun 2023
(Habib Muhammad Romdhoni Mubarak, Ivan Darmawan, Selvi Centia)**

- Kebakaran Hutan di Taman Nasional Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Prosiding Seminar Nasional: Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Retrieved from <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/ProsidingUniks/article/view/3749>
- Maryani, D., & Ruth Roselin E. Nainggolan. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
- Qamariyanti, Y., Usman, R., & Rahmawati, D. (2023). Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(1), 132. <https://doi.org/10.14710/jil.21.1.132-142>
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Sanjoto, A. F., Komari, A., & Rahayuningsih, S. (2019). Analisa Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Bahaya Kebakaran Studi Kasus di RSUD Gambiran Kota Kediri Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Industri Universitas Kediri*, 1(1), 24. Retrieved from <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jurmatis/article/view/292>
- Sari, F. B., & Ayuningtyas, E. (2020). Analisis Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 15(1), 120. Retrieved from <https://jurnalteknik.unkris.ac.id/index.php/plano/article/download/523/429/1866>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Talakua, F. (2022). Penyuluhan Bahaya Kebakaran dan Upaya Penyelamatan Bagi Anak dan Remaja di Jemaat GPI. Papua Betlehem Kota Sorong. *Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 38. Retrieved from <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/aptekmas/article/view/4815/2095>
- Widyastuti, Frianto, A., Untarini, N., & Tiarawati, M. (n.d.). *Manajemen K3 Melalui Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dalam Lingkungan Rumah Tangga*. 6(1), 132. <https://doi.org/10.32493/dkp.v6i1.45211>